

Ikhtisar Webinar

Prospek Ekonomi Indonesia di tengah Ketidakpastian Global



Prospek Ekonomi Indonesia di tengah Ketidakpastian Global

14 Juli 2023 | 08.30 - 11.30 WIB

Webinar Prospek Ekonomi Indonesia di tengah Ketidakpastian Global dibuka oleh *Keynote Speaker* Pak Makmur Keliat, Penasihat Senior LAB45. Kemudian, *webinar* ini menghadirkan empat narasumber, yaitu: (1) Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri; (2) Ninasapti Triaswati, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; (3) Kiki Verico, Peneliti Senior LPEM FEB UI dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan; dan (4) Rionanda Dhamma Putra, Analis Kebijakan Ekonomi Politik LAB 45; serta dimoderatori oleh Radhityana Muhammad, Analis Kebijakan Ekonomi Politik LAB 45.

Makmur Keliat memulai *webinar* dengan menyatakan bahwa apabila melihat *Article IV* IMF terbaru, tidak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan. Ada pula dua hal utama yang disampaikan oleh IMF, yakni terkait hilirisasi serta *nexus* antara sektor fiskal dengan BUMN. Secara global, kini terjadi pertumbuhan utang, terutama utang korporasi. Belakangan ini pun marak terjadi fenomena *glut saving* – hal ini dimungkinkan dengan adanya tiga kelompok (*the rich, the aging, and foreigners*) yang menjadi dominan dalam institusi-institusi keuangan internasional dengan menempatkan dana mereka. Diharapkan diskusi yang akan diadakan ini dapat memberikan masukan-masukan teknokratis.

Rionanda menyampaikan bahwa penilaian IMF bersifat cenderung positif terhadap performa ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi yang menurun, kebijakan fiskal yang sudah kembali ke trayektori pra-pandemi, terbitnya UU Cipta Kerja sebagai upaya reformasi struktural, dan reformasi subsidi energi dan *carbon pricing* menurut IMF adalah kekuatan Indonesia pada masa kini. Terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tidak volatil dibandingkan dengan rata-rata G20 – meskipun lebih volatil dibandingkan rata-rata dunia. Secara rata-rata pertumbuhan, posisi Indonesia berada di urutan keempat tertinggi dan Indonesia pun menjadi salah satu *bright spot* di G20 sejak 2018 hingga (diproyeksikan sampai) 2028. Dari segi tingkat inflasi, Indonesia relatif lebih tidak volatil dan rendah dibandingkan rata-rata G20 serta dunia. Pertumbuhan ekonomi di-*forecast* akan meningkat hingga 2028 dan tingkat inflasi diproyeksikan akan menurun setelah memuncak pada tingkat 5,5% pada 2023. Dinamika utang pemerintah Indonesia dibandingkan PDB relatif stabil – terjadi peningkatan stabilisasi rasio pada tingkat 35% hingga 40% (masih di bawah batas maksimum 60%). Akan tetapi, IMF juga memproyeksikan tren peningkatan defisit transaksi berjalan terhadap PDB

setelah surplusnya memuncak pada tingkat 1% pada 2022. Neraca transaksi berjalan dibandingkan PDB bernilai relatif lebih volatil serta berada dalam posisi defisit.

Proyeksi IMF guna berbagai indikator penting pada 2025 menunjukkan adanya kenaikan kinerja ekonomi Indonesia. Namun, hal yang menjadi catatan bagi IMF adalah pengetatan kebijakan moneter serta kebijakan hilirisasi yang dinilai restriktif. Berdasarkan hal tersebut, IMF merekomendasikan Indonesia guna melanjutkan momentum reformasi fiskal-struktural, mengakhiri kelonggaran supervisi-regulasi era pandemi, menghapus larangan ekspor komoditas secara bertahap, dan menjaga transisi hijau. Indonesia perlu menghadapi tiga tantangan pada masa depan, yakni utang korporasi dan rumah tangga, savings glut, dan adanya FX swap sebagai sumber kerentanan finansial baru yang *off-balance sheet*.

Kiki memaparkan tiga poin utama Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan global. **Pertama**, ekonomi Indonesia sangat resilien dalam menghadapi *perfect storm* global (i.e., pandemi COVID-19 yang memukul *aggregate demand* dan perang Ukraina yang memukul *aggregate supply*). Indonesia pun menjadi salah satu *bright spot*—atau bahkan *brightest spot*—setelah pandemi. Pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara G20 lain pada tahun 2022, tidak terdapat stagflasi. Tidak hanya resilien, perekonomian Indonesia kini pun sudah balik ke tingkat pra-pandemi, dengan GNI per kapita pada 2022 memasuki kategori *upper-middle* kembali. **Kedua**, terdapat beberapa faktor *good luck* dan *good policy* yang hadir. Keberuntungan atau *good luck* Indonesia dapat terlihat dari *current account* pada krisis-krisis global sejak krisis '98 yang alih-alih defisit, justru bernilai surplus. Pada kuartal 1 2023 (pasca-pandemi), *financial account* neraca pembayaran Indonesia meningkat hingga tiga puluh kali lipat. Selain *good luck*, ada pula penerapan *good policy* di Indonesia. Dari perspektif aliran Friedman, Indonesia tergolong sangat produktif. Terbukti dari nilai infrastruktur per PDB yang tinggi. Meskipun begitu, nilai manufaktur per PDB masih relatif rendah dan dapat ditingkatkan. **Ketiga**, adanya transformasi struktural dari *trade-led growth* dan *investment-led growth* menjadi *environment-led growth*. Menurut IMF, peningkatan *environment-led growth* akan meningkatkan biaya sehingga pertumbuhan terhambat. Namun sebaliknya, pada proyeksi Low Carbon Development Initiatives, *environment-led growth* akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum—timbul sebuah diskrepansi. Menurut Kiki, pendekatan pro-lingkungan lebih tepat untuk kegiatan *trade* karena lingkungan global secara umum semua mengarah pada pro-lingkungan.

Ninasapti memaparkan bahwa prospek perekonomian global masih lemah, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi, dan *downside risks* (i.e., tekanan sektor keuangan, *debt distress*, eskalasi perang Ukraina, *geoeconomics fragmentation*, tingkat inflasi persisten tinggi, dan suku bunga tinggi) masih dominan. Dari segi nasional, Indonesia masih dalam proses *recovery*. Indonesia sudah memasuki *middle-income trap* dan dibarengi dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Ada pula peningkatan tingkat inflasi akibat tekanan harga BBM global yang naik sehingga terdapat pula tekanan bagi kelompok berpendapatan rendah – kesenjangan ketenagakerjaan dan kemiskinan pun meluas. Meledaknya *e-commerce* serta debat antara substitusi impor dan *export-led growth* menimbulkan banyak tantangan industrialisasi bagi Indonesia. Rencana hilirisasi sebagai konsep dianggap sah-sah aja, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya. Harus dipertanyakan apakah akan terdapat efek *trickle-down* di daerah-daerah hilirisasi. Hadir dua efek terbesar dari hilirisasi: dampak pada lapangan kerja dan sumber daya alam. Berbeda dengan industri pangan, industri tambang sedikit menyerap tenaga kerja dan berpotensi merusak lingkungan karena tambang bersifat *open pit*. Kemandirian pangan dan energi menjadi penting dalam hal ini. Selain itu, ada pula tantangan bonus demografi dan *sustainable development*.

Andry menyatakan bahwa tahun 2023 adalah episode keempat dari volatilitas yang besar sejak pandemi 2020. Pandemi bersifat *unprecedented*, tetapi juga merupakan momentum akselerasi inisiatif-inisiatif positif. Pertama, pandemi menyadarkan bahwa faktor-faktor nonekonomi sangat besar dan akan menjadi sangat dominan ke depannya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa krisis kesehatan seperti pandemi akan muncul lagi sehingga organisasi-organisasi internasional banyak menyiapkan dana guna menghadapi kejadian yang serupa pada masa depan. Kedua, bagaimana volatilitas ekonomi ketika terjadi kelangkaan energi akibat *shock* (seperti pandemi atau perang). Ketiga, peningkatan kesadaran akan gangguan iklim. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ada dari segi global (e.g., tingginya tingkat inflasi di negara maju, kekhawatiran resesi di negara maju, ketidakstabilan politik, dsb.) dan dari segi domestik (e.g., pemulihan di berbagai sektor, kenaikan harga bahan bakar, dsb.). Lebih lanjut lagi pada segi domestik, terdapat tantangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan *appetite* atau keinginan untuk berinvestasi. Perekonomian Indonesia masih dapat bertumbuh pada tingkat 5,03% dengan dorongan konsumsi dan belanja pemerintah. Keberadaan pesta politik pada tahun yang mendatang juga menjadi tantangan guna mendorong investasi. Pertanyaan besar adalah bagaimana cara untuk *break the cycle* dari penurunan investasi pada tiap tahun pemilu. Hal ini cenderung terjadi karena pada tahun politik, dunia usaha selalu “*wait and see*” sehingga aktivitas investasi menurun.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Bagaimana untuk menurunkan ICOR? Dilihat dari data Kementerian Investasi bahwa investasi cenderung naik secara tren tapi pertumbuhan PMTB cenderung turun.

Ninasapti: Pertanyaan ICOR sangat menarik karena itu tentang iklim investasi, tidak bisa diisolasi. Dari sekitar 2010, sudah dibicarakan bahwa ICOR akan pelan-pelan naik dan sekarang bernilai 0,8. Ini adalah berita buruk bagi Indonesia, dengan semua upaya dalam 10 tahun terakhir bukannya turun justru naik. Kalau di negara lain, izin-izin itu murah sehingga ICOR dapat bernilai rendah; izin-izin di Indonesia mahal dan *uncertainty* tinggi. Setelah izin ada pula pungutan dan biaya proses dalam membangun sebuah usaha. Biaya birokrasi tinggi dari pusat sampai daerah; *pungli*-nya banyak dan korupsinya besar. Sudah ada UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memotong biaya, tetapi belum diimplementasikan dengan baik. Di Indonesia, baru berniat investasi sudah banyak biaya di atas kertas dan di bawah meja. Indonesia *challenge*-nya adalah di proses yang berbelit-belit dan sudah menjadi *behavior* atau budaya. Budaya tersebut harus bisa diubah dengan sistem—contoh dengan *e-government* yang waktu pandemi diberlakukan, namun sekarang sudah kembali ke kertas fisik.

Kiki: ICOR adalah konsepnya Harrod-Domar; inefisiensi adalah salah satu variabel dalam model Harrod-Domar. Inefisiensi biasanya dideteksi dengan *cost of production*. ICOR tinggi karena infrastruktur yang dibangun belum *connect* dengan *manufacturing*-nya. Dari sisi demand, misal pembangunan jalan tol dan pelabuhan, sudah berdampak. Sisi *manufacturing* lah yang belum berdampak dan masih turun.

Pertanyaan: Bagaimana kesiapan secara ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia ketika tujuan The Feds mengendala pencegahan inflasi direspons oleh rivalitas perbankan yang secara geopolitik masih cenderung berhadapan mengelola ekspor dan penguasaan pasar-pasar. Semisalkan, yang kita lihat hari ini antara The Feds dan Bank of Asia serta China Bank. Kedua, sepak terjang dari OECD dan World Bank juga punya varian *counter-inflation* yang tidak compatible dengan stabilitas produktif oleh PDB yang ada di Indonesia; bagaimana peran penting kita dalam hal ketahanan nasional dan sektor keuangan perbankan?

Andry: Kalau kita lihat dari sisi perbankan, yang perlu dilihat ada dari sisi asset-liabilities. Dari sisi aset, kita melihat bagaimana nanti larinya di sisi target pertumbuhan kreditnya dan juga bagaimana dari sisi kualitas asetnya sendiri. Tentu saja, kenaikan suku bunga acuan impactnya dua sisi, sisi yang pertama adalah pressure kenaikan suku bunga di domestik, terutama BI rate. Positifnya adalah bahwa angka inflasi sekarang sudah turun, mungkin akan

berada di 3%. Artinya, dengan suku bunga acuan BI sekarang, kemungkinan suku bunga BI tidak akan naik lagi. Potensi dari sisi revenue itu masih cukup baik dan sektor-sektor di Indonesia sudah banyak yang recover. PDB harga konstan 2023 Kuartal 1 dibandingkan dengan PDB harga konstan *by sector* di tahun 2019 rata-rata semua rasionya di atas 100%; artinya sudah masuk sektor hijau. Hanya beberapa atau sedikit sektor yang memang di area merah. *Overall*, karena pasar domestik cukup besar, perkembangan sektor perbankan masih cukup baik pada 2023 dan juga 2024. Untuk pertanyaan kedua, peran pentingnya sektor perbankan adalah menjaga stabilitas – melihat kecukupan rasio likuiditas, mitigasi risiko.

Pertanyaan: Dengan adanya ancaman perubahan iklim dan lain-lain, apakah *green economy* terdapat *trade-off* dengan pertumbuhan ekonomi? Apa yang sebaiknya dilakukan?

Kiki Verico: Pertanyaan ini paling cocok dengan teori Simon Kuznets bernama *inverted U-curve*. Saat melakukan transisi, akan ada *divergence*. Pertama-tama akan naik ketimpangannya, tetapi lama-lama akan turun. Kalau kita beralih ke *green economy*, akan terdapat *divergence*, tetapi pada jangka panjang akan *convergence*. Hal ini karena sekarang negara-negara maju mengakselerasi agenda *climate change* sehingga mempengaruhi ekspor-impor negara berkembang; sehingga negara berkembang harus *go green* pula.

Ninasapti: Prosesnya akan memakan waktu. Secara makro, saat pertumbuhan daerah naik, harga yang dibayar adalah harga lapangan kerja dari petani yang *shifting*. Hal ini susah dilihat dari data karena data Indonesia sangat lambat di-*update* dan *sampling*-nya kecil. Setelah data baru muncul, baru disadari dan dikeluarkan aturannya.

Andry: Dari sektor finansial, kita lihat dari tiga sisi. Pertama, untuk bank yang sudah *listed*, dibutuhkan investor. Investor akan melihat apakah bank tersebut sudah melakukan ESG (*environmental, social, and governance*). Penerapan ESG yang baik akan menarik investor sehingga sektor finansial mendukung transisi. Kedua, dilihat dari sisi potensi pemberian kredit. Bila industri manufaktur semakin *comply* dengan ESG, peluang pertumbuhan kredit semakin banyak. Ketiga, ketika kita mendorong untuk penerbitan *financing* dan juga instrumen investasi; ESG ini semakin penting karena bank-bank besar sudah mengeluarkan *green bonds* dan *sustainable bonds*.

Pertanyaan: Target pertumbuhan ekonomi 7%, bisakah dicapai Indonesia pada 2045 dan juga bersifat *green* (tetap menjaga lingkungan)?

Ninasapti: Tanpa *go green*, 7% saja sudah cukup berat. Pertumbuhan 7% harus dibarengi perubahan perilaku dan peraturan. UU Cipta Kerja harus diimplementasikan untuk

mencapainya. Pemilu juga akan mengerem pembahasan pertumbuhan 7% ini. *Political cycle* akan memengaruhi *economic cycle*.

Pertanyaan: Pada *Article IV* IMF, Indonesia direkomendasikan untuk pelan-pelan mencabut ekspor nikel, apakah ini sebaiknya dilakukan?

Ninasapti: Yang menjadi masalah adalah apakah kita memiliki *blueprint* untuk melakukannya. Indonesia adalah non-blok sehingga menjadi PR dari segi politik. Bila tadi Indonesia ingin bantuan besar untuk industrialisasi, Indonesia harus mengikuti blok. Kalau mau tetap non-blok, posisi harus kuat sekali.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Rabu, 14 Juli
2023